

Status penahanan terdakwa terhadap putusan kasasi yang membatalkan putusan bebas pengadilan negeri dan mahkamah agung memerintahkan memeriksa dan mengadili kembali = The detention of the defendant against the cassation cancelling the acquittal of the district court and the supreme court ordering to re-examine and re-try.

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20314425&lokasi=lokal>

---

#### Abstrak

Penahanan itu merupakan salah satu bagian dari upaya paksa, yang mana dalam melaksanakannya tidak dapat dilakukan sewenang-wenang tetapi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Dalam hal ini ketika merujuk pada putusan kasasi No. 1934 K/Pid/2008 yang pada putusan kasasi tersebut Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan mengenai status penahanan terdakwa, apakah terdakwa akan ditahan kembali atau tidak. Berdasarkan kasus tersebut maka pada skripsi ini akan dibahas mengenai syarat-syarat batalnya putusan pidana, status penahanan terdakwa dan tata cara penahanan terhadap terdakwa jika terdakwa ditahanan dan juga akan dijelaskan secara singkat mengenai tata cara memeriksa dan mengadili kembali perkara yang batal demi hukum.

<hr>

<b>Abstract</b><br>

Detention is one of the forcible means, which in implementation cannot be carried out arbitrarily, but must be in accordance with applicable regulations, namely the Criminal Law Procedures code. In this case, when referring to the cassation No. 1934 K/Pid/2008 in which the Supreme Court overruled the acquittal of the District Court in Surabaya and the Supreme Court ordered to re-examine and retry the case, a problem, due to this, arose regarding the detention status of the accused, who will be arrested again or not. Based on the case, this undergraduate thesis will discuss the requirements for the annulment of the decision of criminal, defendant's detention status and procedures for the detention of the accused if the accused is arrested and will also be briefly described regarding the procedures for examining and re-trying the case that is null and void by law.